

**KUMPULAN MAKALAH SEMINAR  
SOSIALISASI PENGKJIAN PENGEMBANGAN  
PERPUSTAKAAN  
di Hotel Dana Surakarta Tanggal 16 Oktober 2009**

1. Pemanfaatan AliH Media Untuk Pengembangan Perpustakaan Digital – Sri Hartinah
2. Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta – Kanwil Dep. Hukum Jawa Tengah
3. Permasalahan yang Dapat Timbul Dalam Pelaksanaan Kewajiban Penerbit dan Pengusaha Rekaman –Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
4. Peran POLRI Dalam Peningkatan Ketaatan Terhadap UU No. 4 1990
5. Kebijakan Pembangunan Perpustakaan Digital Nasional – Dina Isyanti
6. Perpustakaan Sebagai Pusat Sumber Relajar
7. Penyempurnaan Nazca Akademik Raperda Perpustakaan – Jamal Wiwoho
8. Kebijakan Implementasi UU RI No. 4/1990 Pasca UU No. 43/2007 – Sungkowo Raharjo.

**Milik Lasa Hs.**

**KUMPULAN MAKALAH SEMINAR  
SOSIALISASI PENGKJIAN PENGEMBANGAN  
PERPUSTAKAAN  
di Hotel Dana Surakarta Tanggal 16 Oktober 2009**

1. Pemanfaatan AliH Media Untuk Pengembangan Perpustakaan Digital – Sri Hartinah
2. Perlindungan Hukum di Bidang Hak Cipta – Kanwil Dep. Hukum Jawa Tengah
3. Permasalahan yang Dapat Timbul Dalam Pelaksanaan Kewajiban Penerbit dan Pengusaha Rekaman –Kejaksaaan Tinggi Jawa Tengah
4. Peran POLRI Dalam Peningkatan Ketaatan Terhadap UU No. 4 1990
5. Kebijakan Pembangunan Perpustakaan Digital Nasional – Dina Isyanti
6. Perpustakaan Sebagai Pusat Sumber Relajar
7. Penyempurnaan Nazca Akademik Raperda Perpustakaan – Jamal Wiwoho
8. Kebijakan Implementasi UU RI No. 4/1990 Pasca UU No. 43/2007 – Sungkowo Raharjo.

**Milik Lasa Hs.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

SELAMAT PAGI



SriHartinah/Solo, 16Oktober09

1

## Pemanfaatan Alih Media untuk Pengembangan Perpustakaan Digital

Ir. Sri Hartinah, MSi

Disampaikan dalam rangka  
SOSIALISASI PENGAJIAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Hotel Dana-Solo 16 Oktober 2009

SriHartinah/Solo, 16Oktober09

2

# Latar Belakang Perlindungan Hak Cipta

## PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PROPINSI JAWA TENGAH

1

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



HKI

Hak Cipta

- ☉ Seni
- ☉ Sastra
- ☉ Ilmu Pengetahuan
- ☉ Hak-hak Terkait (Pelaku, Rekaman, dsb)

Hak Milik Industri

- ☛ Paten (Penemuan Teknologi)
- ☛ Merek (Simbol/ Nama Dagang Barang/ Jasa)
- ☛ Desain Industri (Penampilan Produk: Bentuk, Konfigurasi & Komposisi )
- ☛ Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Rancangan Peletakan Rangkaian Elemen-elemen Elektronik)
- ☛ Rahasia Dagang (Informasi Rahasia yang memiliki nilai ekonomi)
- ☛ Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) (dikelola Dep. Pertanian)

2

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah  
PENDAHULUAN  
Semarang

Dalam rangka memenuhi permohonan wawancara dari Badan  
Arsip Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah sebagai pembicara  
pada rapat koordinasi evaluasi UURI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah  
Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam pada tanggal 13 Oktober 2009 di  
Badan Arsip Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah yang telah di  
ikuti bersama ini hendak kami kemukakan permasalahan yang dapat timbul  
dan pelaksanaan kewajiban Penerbit dan Pengusaha Rekaman menyerahkan  
**PERMASALAHAN YANG DAPAT TIMBUL DALAM PELAKSANAAN  
KEWAJIBAN  
PENERBIT DAN PENGUSAHA REKAMAN MENYERAHKAN KARYA  
CETAK DAN KARYA REKAMAN**

nomor 4 th 1990 tentang "Karya Rekam ..."  
karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa  
yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada  
umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu  
pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta  
pelestarian kekayaan budaya bangsa. Untuk pemertastannya perlu  
dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan di suatu tempat tertentu  
sebagai koleksi nasional".  
Selanjutnya disebutkan: "... Undang-undang tentang Serah-  
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada hakikatnya disusun dalam  
usaha menghimpun, melestarikan dan mewujudkan  
koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional dan untuk  
mewujudkan koleksi karya - karya tersebut sebagai hasil budaya bangsa,  
sehingga terwujud suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi  
Disampaikan pada rapat koordinasi evaluasi UURI Nomor 4 Tahun 1990  
Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam - diselenggarakan  
Badan Arsip Dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2009

**PERAN POLRI DALAM PENINGKATAN KETAATAN  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 4 TAHUN 1990  
TENTANG  
SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM**

**I. Pendahuluan**

Bahwa serah simpan karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Oleh karena itu dalam rangka memanfaatkan hasil budaya bangsa tersebut karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara dan dilestarikan disuatu tempat tertentu sebagai koleksi nasional yang lengkap.

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karya dari hasil budaya bangsa, sehingga terwujudnya suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Penyerahan karya cetak dan karya rekam ini bertujuan hanya untuk disimpan, dilestarikan dan didayagunakan sesuai dengan tujuan Undang-undang. Penyerahan tersebut tidak meliputi penyerahan hak ciptanya.

**II. Pengertian**

1. Karyacetak: adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. (Pasal 1 Butir 1 UU RI No.4 Thn.1990)
2. Karya rekam: adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. (Pasal 1 Butir 2 UU RI No.4 Thn.1990).
3. Penerbit: adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak. (Pasal 1 butir 3 UU RI No.4 Thn.1990).
4. Pengusaha rekaman: adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam. (Pasal 1 butir 4 UU RI No.4 Thn.1990).
5. Perpustakaan Nasional: adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia. (Pasal 1 butir 5 UU RI No.4 Thn.1990)

# Kebijakan Pembangunan Perpustakaan Digital Nasional<sup>1</sup>

oleh:

Dina Isyanti<sup>2</sup>

## A. Latar Belakang

Perpustakaan digital bukan topik baru di lingkup internasional maupun di Indonesia. Gagasan dan upaya untuk membangun jejaring perpustakaan digital di Indonesia sudah muncul dan mulai dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lampau, sehingga saat ini terbentuk beberapa jaringan perpustakaan digital, baik yang dibangun berdasarkan kesamaan jenis perpustakaan, layanan, maupun koleksinya, seperti IDLN (*Indonesia Digital Library Network*) yang dikelola oleh KMRG (*Knowledge Management Research Group*) Bandung, jaringan perpustakaan perguruan tinggi INHERENT, Jardiknas, dsb.

Implementasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) di Perpustakaan Nasional RI (selanjutnya disingkat Perpustakaan Nasional) sudah berlangsung sejak tahun 1992, yaitu dengan dimulainya kegiatan pembangunan jaringan lokal komputer di lokasi Jln. Salemba Raya 28a Jakarta. Perangkat lunak pendukung operasional perpustakaan yang digunakan pada saat itu adalah VTLS (*Virginia Tech Library System*) yang dikembangkan oleh pengembang di Virginia, Amerika Serikat. Dengan masuknya Internet ke Indonesia, implementasi teknologi di Perpustakaan Nasional juga terus mengalami pengembangan dari lingkup jaringan lokal (*local area network/LAN*) menjadi jaringan luas (*wide area network/WAN*) yang mencakup lokasi Perpustakaan Nasional di Jln. Salemba Raya 28a dan Jln. Merdeka Selatan 11 Jakarta. VTLS yang diterapkan di Perpustakaan Nasional juga mengalami *upgrade* ke versi yang berbasis web (dapat diakses melalui Internet), yang dinamakan Virtua.

Sejak tahun 2006 Perpustakaan Nasional beralih dari Virtua ke INLIS, perangkat lunak pendukung operasional perpustakaan berbasis web yang dikembangkan sendiri. Penerapan INLIS memungkinkan disajikannya katalog koleksi Perpustakaan Nasional pada situs web <http://www.pnri.go.id>. Dengan demikian, pemustaka dapat menelusur katalog koleksi Perpustakaan Nasional melalui Internet. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga menyelenggarakan berbagai layanan *online* dan menyediakan berbagai informasi dalam format digital yang dapat diakses melalui <http://www.pnri.go.id> dan <http://digilib.pnri.go.id>.

Bersamaan dengan perkembangan di atas, wacana dan berbagai langkah persiapan pembangunan perpustakaan digital dalam lingkup nasional sudah dimulai. Pembangunan

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam Sosialisasi Pengkajian Pengembangan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Oktober 2009 di Hotel Dana, Solo.

<sup>2</sup> Kepala Bidang Kerja sama Perpustakaan dan Otomasi - Perpustakaan Nasional RI.



**BERDASARKAN  
RENSTRA DEPDIKNAS  
TIGA PILAR  
KEBIJAKAN STRATEGIS  
BANGDIK**

**PEMERATAAN  
& PERLUASAN  
AKSES  
PENDIDIKAN**

**PENINGKATAN  
MUTU,  
RELEVANSI &  
DAYASAING  
PENDIDIKAN**

**PENINGKATAN  
TATA KELOLA,  
AKUNTABILITAS  
& CITRA PUBLIK  
PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN**





# Penyempurnaan Naskah Akademik Raperda Perpustakaan<sup>1</sup>

Oleh:

Jamal Wiwoho<sup>2</sup>

---

Penyusunan peraturan perundang-undangan perlu didasarkan atas empat unsur penting yaitu unsur-unsur yuridis, sosiologis, filosofis dan teknik perancangan. Ditinjau dari sudut perancangan regulasi, keempat unsur tersebut dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) kelompok utama yaitu:<sup>3</sup>

1. Tahap Penyusunan Naskah Akademik
2. Tahap perencanaan yang meliputi aspek prosedural dan aspek penulisan rancangan.

## A. Sekilas Mengenal Naskah Akademik

Naskah Akademik dapat diartikan sebagai konsepsi pengaturan suatu masalah (objek perundang-undangan) secara teoritis dan sosiologis. Naskah akademik secara teoritik mengkaji dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga mempunyai landasan pengetahuan yang kuat<sup>4</sup>. Definisi lain dari Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:<sup>5</sup>

1. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat.
2. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat.
3. Materi-materi yang harus diatur peraturan tersebut.
4. Aspek-aspek teknis penyusunan.

---

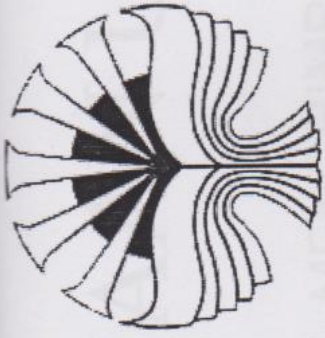
<sup>1</sup> Disampaikan dalam Rapat Pembahasan Raperda Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Dana Solo pada tanggal 15 Oktober 2009

<sup>2</sup> Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH, MHum. Dosen S1,S2, S3 Fakultas UNS. 08122601681

<sup>3</sup> W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono. *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan daerah*, 2009. hlm 70

<sup>4</sup> Aan Eko Widiarto, naskah Akademik Sebagai Pembentukan Rancangan Produk Perundang-undangan Daerah. Makalah 2005. Hlm. 3

<sup>5</sup> Jazim ham idi. bahan Kuliah Naskah Akademik. 2006. tanpa halaman.



**KEBIJAKAN IMPLEMENTASI UU RI NO. 4/1990  
TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM  
PASCA UU RI NO. 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN**

Oleh :

H. Sungkowo Rahardjo

Pustakawan Utama – PNRI Jakarta

**Koordinasi Evaluasi UU RI No. 4 Tahun 2009  
Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

15 Oktober 2009  
Solo – Jawa Tengah

